BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang relasi agama dan negara merupakan permasalahan yang selalu aktual dan masih relevan untuk diperbincangkan, baik dalam tataran akademis maupun dalam forum-forum diskusi. Hal ini cukup beralasan, karena negara dalam agama khususnya Islam mempunyai posisi yang sangat strategis. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap negara dan sistem politik, bahkan politik dan negara dalam Islam merupakan bagian dari pemikiran dan peradaban Islam. Ajaran-ajaran Islam tentang politik dan negara dapat ditemukan dalam ayat al-Qur'an, hadith dan pendapat para sarajana muslim.[1]

Sedangkan dari sisi historis, misi utama diutusnya para nabi dan rasul terdahulu adalah mengajak umatnya untuk bertauhid dan menyembah Tuhan, tidak terkecuali Muhammad. Bertauhid bukan hanya dalam ibadah ritual tapi juga dalam urusan-urusan duniawi haruslah tauhid sumbernya.[2] Risalah tauhid itu yang mengajarkan manusia untuk menjadikan agama sebagai sumber inspirasi dalam semua urusan, mulai dari urusan rumah tangga sampai urusan negara. Kepiawaian Muhammad dalam menata kota Madinah dan mencitrakannya sebagai kota yang aman dan tentram bagi masyarakatnya yang sangat plural, berasal dari bermacam suku, agama dan bangsa di bawah pemerintahan yang

---

[1] Ahmad Shalabi, *al-Siyāsah fī al-Fikr al-Islamī* (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, 1983), 31-32.

[2] Mengesakan Tuhan dalam segala urusan mempunyai arti bahwa setiap urusan yang dilakukan haruslah bersumber dari ajaran Tuhan dan bukan dari yang lainnya, terutama dalam ketatanegaraan dan pemerintahan. Lihat. Abū al-A'lā al-Maudūdi, *Naẓariyāt al-Islām al-Siyāsah* (t.t., Dār al-Fikr, 1967), 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipimpinnya, membuktikan bahwa Muhammad bukan hanya seorang Nabi tetapi juga negarawan. Beberapa langkah yang dilakukan Nabi Muhammad menunjukkan bahwa dirinya adalah sebagai negarawan disamping tugasnya sebagai utusan Allah. Diantaranya adalah *bai'at aqabah* yang terjadi dua kali,[3] antara Nabi Muhammad dan sebagain penduduk Madinah dan diterbitkannya Piagam Madinah.[4]

Tatanan masyarakat atau bangsa baru yang dibangun oleh Nabi di Madinah adalah sebuah tatanan masyarakat yang paradoks dari tatanan masyarakat yang ada sebelumnya yang hanya didasarkan atas kesukuan dan kekeluargaan, kemudian disatukan dalam konsep *ummah* (masyarakat, bangsa), suatu tatanan masyarakat internasioanal tanpa batas kesukuan dan keagamaan, suatu masyarakat kosmopolit yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama. Di jantung proyek itu berlangsung peralihan kekuasaan dari kerajaan kepada Nabi dan kemudian kepada umat. Komunitas ini didasarkan atas syari'at yang dirancang untuk menetapkan aturan-aturan tentang moral, hukum, keyakinan dan ritual agama, pernikahan dan perdagangan.[5]

---

[3] *Bai'at aqabah* yang pertama terjadi pada tahun keduabelas kenabian dimana dua belas laki-laki penduduk Yathrib bertemu dengan Nabi di tempat bernama Aqabah, dimana pada tahun sebelumnya sudah ada enam orang yang bertemu Nabi pada tempat yang sama dan menyatakan diri masuk Islam. Dan diantara isi pertemuan tersebut adalah mereka berjanji setia (*bai'at*) kepada Nabi untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta serta tidak mengkhianati Nabi. Kemudian pada tahun berikutnya, 75 orang penduduk Yathrib yang sudah masuk Islam menemui Nabi di tempat yang sama dan menyatakan sumpah setia (*bai'at*) kepada Nabi, yang isi sama dengan *Bai'at Aqabah* yang pertama, tetapi pada yang kedua ini ada isyarat jihad. Mereka akan membela Nabi sebagaimana mereka membela anak isteri mereka, dan *bai'at* ini dinamakan *Bai'at Aqabah* yang kedua. Lihat. Jubair Situmorang, *Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan I, 2014), 122.

[4] Piagam madinah adalah konstitusi negara pertama di dunia yang tertulis, dimana di dalamnya memuat aturan-aturan yang mengatur hubungan antar komunitas yang ada di Madinah. Dan perlu diketahui bahwa Madinah saat itu adalah kota yang majemuk, terdiri dari ragam etnis, suku dan agama. Ibid., 123.

[5] Antony Black, *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present,* Terjemah Abdullah 'Ali dan Mariana Ariestyawati (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkembangan selanjutnya setelah meninggalnya Rasulullah tampuk kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Abu Bakar, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab, Uthman bin 'Affan dan 'Ali bin Abi Thalib.[6] Keempat khalifah ini lebih dikenal dengan *khulafā' al-rashidūn,* dan sistem pemerintahan mereka lebih dikenal dengan sistem khilafah dalam Islam yang mengedepankan asas-asas musyawarah dalam urusan pemerintahan, terutama dalam proses pergantian khalifah.

Setelah wafatnya 'Ali bin Abi Thalib, tampuk kepemimpinan umat Islam berada di tangan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Pada masanya sistem pemerintahan Islam telah berubah yang sebelumnya berdasarkan kekhalifahan menjadi sistem monarki atau kerajaan yang lebih mirip dengan sistem kerajaan Persia. Begitu juga setelah kekuasaan umat Islam berpindah ke tangan Bani 'Abbasiyyah dan kerajaan – kerajaan Islam setelahnya, nyaris sistem pemerintahan umat Islam berada di bawah kekuasaan kerajaan yang belum pernah dikenal pada masa rasulullah, bahkan mirip dengan kerajaan ala Persia.

Eksistensi pemerintahan Islam sejak zaman Nabi Muhammad hingga keruntuhannya pada masa pemerintahan kesultanan Turki 'Uthmani pada tahun 1924 ditandai dengan berdirinya sistem pemerintahan negara bangsa dengan berbagai corak dan sistem yang diterapkan pada masanya telah menghasilkan

---

[6] Ada empat ciri pengangkatan khalifah setelah Rasulullah wafat yang identik dengan sistem kekhalifahan itu sendiri, *pertama,* pemilihan bebas dan terbuka melalui forum musyawarah tanpa ada seorang calon sebelumnya, hal ini terjadi pada musyawarah terpilihnya Abu Bakar dib alai pertemuan Tsaqifah Bani Saidah, *kedua,* pemilihan dengan cara penunjukan kepada seseorang yang didasarkan terlebih dahulu pada musyawarah diantara para sahabat, hal ini terjadi ketika terpilihnya 'Umar bin Khattab sebagai khalifah, *ketiga,* pemilihan yang dilakukan oleh timyag dibentuk oleh khalifah, cara ini terjadi ketika pemilihan 'Uthmān bin 'Affan dan yang *keempat,* pemilihan yang terjadi secara spontanitas oleh umat Islam ketika negara terjadi kekacauan atau pemberontakan, ini terjadi pada pemilihan 'Ali bin Abi Talib sebagai khalifah. Lihat. M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut Fazlurrahman,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikir-pemikir dari kalangan umat Islam dari zaman klasik sampai kontemporer yang konsen terhadap ketatanegaraan dalam pemerintahan Islam.

Geliat tentang pemikiran dan konsep negara Islam pada abad modern semakin meningkat intensitasnya dan banyak diminati oleh para pemikir Islam. Meningkatnya intensitas tersebut dipengaruhi oleh tiga hal yang mendasar, *pertama,* kerapuhan dunia Islam oleh faktor-faktor internal yang berakibat munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian, *kedua,* adanya rongrongan dari dunia Barat terhadap keutuhan politik dan wilayah Islam dan *ketiga,* Superioritas Barat dalam hal ilmu pengetahuan dan tekhnologi atas dunia.[7] Setidaknya tiga faktor inilah yang mendorong para pemikir Islam untuk bangkit dan membangun kembali kemajuan peradaban Islam yang dicapai pada masa silam.

Pada hakikatnya, tujuan pokok pemerintahan Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia dan mencegah segala bahaya, menegakkan keadilan dan melarang semua permusuhan antar manusia. Islam lebih menekankan kepada penanaman tata nilai dan etika yang sesuai dengan al-Qur'an dalam pemerintahan Islam.[8] Islam memberikan keleluasaan dan keluwesan dalam kekuasaan dan pemerintahan asalkan tidak meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan oleh agama.

Relasi antara agama dan negara sudah lama menjadi topik kajian para pemikir. Hal ini lantaran para penyebar agama sekaligus adalah pemimpin dalam masyarakat, fenomena perhimpitan peran antara penguasa agama dan penguasa

---

[7] Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran,* cet. V, (Jakarta, UI Press, 1993), 115.
[8] Gaffar Aziz, *Berpolitik Untuk Agama; Misi Islam, Kristen dan Yahudi tentang Politik,* cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik, yang dengan demikian juga perebutan pengaruh diantara keduanya, sudah berlangsung sejak zaman para nabi. Tapi sebagai suatu fenomena yang diperdebatkan, yang kemudian menimbulkan kebutuhan untuk memisahkan kedua hal tersebut,[9] masalah hubungan antara agama dan negara sudah dipikirkan sejak zaman pertengahan. Secara sederhana dapat dikemukakan, hubungan antara agama dan negara atau antara penguasa agama dan penguasa politik, berdasarkan derajat pentalan pengaruhnya terhadap orang lain, merupakan hubungan dikhotomis.[10] Pada kutub yang satu adalah hubungan *religio-political power* yang bersifat organik, yang menyatukan kehidupan agama dengan kehidupan politik dengan alasan bahwa kehidupan agama bersifat holistik, mencakup semua kehidupan manusia. Dalam kehidupan bernegara, hubungan seperti ini mewujud ke dalam sistem teokrasi sebagaimana dianut negara-negara monarkhi di Eropa di Abad Pertengahan atau Iran di masa sekarang.

Pada titik kutub yang lain adalah sistem ketatanegaraan yang memisahkan sama sekali kehidupan agama dari kehidupan politik, yang mewujud ke dalam sistem pemerintahan kenegaraan sekuler sebagaimana dianut negara-negara demokrasi sekarang ini. Bukan hal yang kebetulan bahwa sifat sekelur ini dianut oleh negara-negara demokrasi ini karena hal ini sesuai dangan salah satu prinsip demokrasi bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi individual yang tidak boleh dicampuri oleh penguasa politik, satu prinsip demokrasi yang lahir dari gerakan reformasi Katolik pada abad ke-16. Semua negara di dunia ini, dalam hal pengaruh terhadap kehidupan politik, dapat ditempatkan pada titik-

---

[9] Barbara Freyer Stowasser, "Agama dan Perkembangan Politik: Antara Ibnu Khaldun dan Machieveli", Bagian Pertama, *Ulumul Qur'an* No. 3, Vol. V, Tahun 1994, 89.

[10] Ini pendapat Donald Eugene Smith, dikutip dari Zainuddin Maliki, "Menatap Masa Depan Politik Islam di Indonesia", *DIALOG,* edisi I Tahun 2004, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

titik di antara kedua kutub ini, lebih dekat ke ciri negara teokrasi atau lebih dekat ke ciri negara sekuler.

Setidaknya ada tiga tipologi dalam kalangan pemerhati dan pemikir Islam mengenai pemerintahan Islam, khususnya dalam relasi agama dan negara. *Pertama,* Islam adalah agama sekaligus negara (*dīn wa dawlah*). Kelompok ini memandang bahwa Islam dan negara adalah dua entitas yang menyatu. Hubungan Islam dan negara adalah hubungan organik, yaitu negara berdasarkan syariat Islam dengan ulama sebagai penasehat resmi eksekutif atau pemegang kekuasaan tertinggi. Tokoh yang mengusung pemikiran ini antara lain; Rashīd Riḍā (1865-1935), Sayyid Quṭb (1906-1966), Abū al-A'lā al-Maudūdi (1903-1979) dan di Indonesia Muhammad Nathir. *Kedua,* tipologi sekuler, yaitu kebalikan dari yang pertama. Menurut tipologi ini Islam adalah agama yang tidak berbeda dengan agama lainnya dalam hal tidak mengajarkan cara-cara pengaturan tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam adalah agama murni, bukan negara. Pemikir yang termasuk dalam tipologi ini adalah 'Alī 'Abd al-Rāziq (1888-1966), A. Luthfi al-Sayyid (1872-1963). Dan tipologi yang *terakhir* adalah tipologi moderat, tipologi ini menolak klaim ekstrem bahwa Islam adalah agama yang lengkap, yang mengatur semua urusan, termasuk politik dan urusan negara, akan tetapi juga menolak klaim ekstrem yang kedua yang melihat bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan negara. Tipologi ini memandang kendati Islam tidak menunjukkan preferensinya pada sistem politik dan pemerintahan tertentu, dalam Islam terdapat prinsip moral atau etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan untuk pelaksanaannya, umat Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bebas memilih sistem manapun yang terbaik. Diantara tokoh-tokohnya adalah; Muhammad Husein Haikal (lahir 1888) dan Muhammad 'Abduh (1862-1905).[11]

Perbedaan wacana tentang relasi agama dan negara di kalangan para pemikir Islam bisa dilihat dari dua faktor yang mempengaruhinya, intern dan ekstren. Faktor intern berasal dari pemahaman seseorang tentang ajaran-ajaran Islam itu sendiri, sedangkan faktor ekstern berasal dari kondisi lingkungan, sosial, budaya, politik, dan tingkat peradaban dimana tokoh tersebut hidup dan mengembangkan cara berfikirnya. Baik faktor intern maupun ekstern, setidaknya saling tarik-menarik dalam mempengaruhi konstruk pemikiran seseorang, terutama dalam kaitannya tentang wacana relasi agama dan negara.

Terkait dengan wacana tersebut, penulis ingin memaparkan konstruk pemikiran kedua tokoh tentang relasi agama dan negara yang diusung oleh Syaikh Taqiyyudin al-Nabhānī (1909-1979) dengan Zainal Abidin Ahmad (1911-1983). Penulis tertarik untuk mengusung kedua tokoh tersebut, karena kedua-keduanya sangat konsen dalam masalah-masalah ketatanegaraan, terutama dalam hal relasi agama dan negara, yang bisa ditemukan dalam berbagai karya tulisnya, disamping itu keduanya juga aktif dalam gerakan politik di negaranya masing-masing. Faktor lingkungan, kondisi sosial, budaya, politik dan budaya kiranya juga sangat berpengaruh dalam mengkonstruk pemikiran keduanya.

Kondisi sosio-politik Palestina, dimana al-Nabhani lahir dan tumbuh saat itu adalah merupakan negara jajahan Inggris yang kemudian diberikan negara tersebut kepada bangsa Israel, sehingga Palestina yang dahulunya merupakan jajahan Inggris berubah menjadi negara jajahan Israel. Hal ini yang kemudian

[11] Jubair Situmorang, Model Pemikiran…., 25-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak mempengaruhi al-Nabhānī dalam beberapa aktifitas politiknya, yang di kemudian hari dia mendirikan sebuah partai *Hizb Taḥrīr* (HT), yang pada mulanya bertujuan untuk memerdekakan Palestina dari penjajahan bangsa Israel.[12]

Kondisi negara Palestina di bawah jajahan Barat telah menimbulkan sikap non-kompromis dan anti Barat pada diri al-Nabhāni, dia menilai bahwa akar permasalahan dari keterpurukan umat saat ini adalah hegemoni Barat terhadap dunia Islam dan penerapan sistem Barat terhadap negara-negara mayoritas muslim. Al-Nabhāni beserta para loyalisnya menyerukan kepada umat Islam untuk menolak konsep, nasionalisme, trias politika, kedaulatan rakyat, sistem sekular dan konsep politik lain yang bertentangan dengan syari'at Islam.[13] Penerapan syari'at Islam secara total, menurut al-Nabhānī adalah solusi atas problematika umat Islam saat ini.

Penerapan syariat Islam secara *kaffāh* tidak mungkin akan terealisasikan melalui kesadaran sosial masyarakat saja, terbentuknya sebuah tatanan pemerintahan Islam adalah satu-satunya solusi bagi penerapan syariat Islam tersebut. Al-Nabhānī berpendapat bahwa generasi setelah Rasulullah adalah bentuk ideal dari sebuah tatanan negara Islam yang patut ditiru untuk mengeluarkan umat Islam dari keterpurukan. Dari sinilah, kemudian dia mempunyai konstruk pemikiran tentang berdirinya sebuah tatanan dunia baru di bawah sistem khilafah sebagai respon dari hegemoni Barat atas dunia Islam.[14]

---

[12] M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia,* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), 55-56.
[13] Ibid., 52-53.
[14] Taqiyyudin an-Nabhani, *Mafahim Hizhut Tahrir,* (al-Quds, Hizbut Tahrir, 2001), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lain halnya dengan Zainal Abidin Ahmad yang lahir di Indonesia, dimana pada saat itu Indonesi baru memperoleh kemerdekaannya dari penjajah. Indonesia sebagai negara yang merdekaa saat itu sedang mencari jati dirinya. Berbagai forum dan diskusi hangat mempersoalkan tentang konstitusi Indonesia. Kondisi ini yang kemudian banyak mempengaruhi konstruk pemikiran Zaenal Abidin Ahmad dalam berbagai karya tulisnya, selain itu dia aktif dalam kepengurusan partai Masyumi yang saat itu giat memperjuangkan pemerintahan Indonesia yang berdasarkan atas syariat Islam atau pemberlakuan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks keindonesiaan, terutama pada awal-awal kemerdekaan hingga tahun 1970-an, umat Islam, terutama para sarjanawan muslim menerima sistem demokrasi sebagai model pemerintahan Indonesia.Hanya yang menjadi perdebatan diantara para sarjana muslim saat itu adalah, demokrasi seperti apa yang akan dipraktekkan di Indonesia. Zaenal Abidin Ahmad adalah salah satu pendukung model Negara Demokrasi Islam bersama M. Nasir. Sikap Zaenal Abidin Ahmad terhadap konstruk negara Islam lebih bersifat substanstif dari pada hanya formalistik belaka. Sehingga walaupun, dalam kenyataannya demokarasi adalah produk Barat, tapi hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk diterapkannya syariat Islam.

Pemikiran kedua tokoh sezaman namun berbeda tempat tentang konstruksi Negara Islam, mendorong penulis untuk memilih judul: *Relasi Agama dan Negara , Studi Pemikiran Taqiyyudin al-Nabhani dan Zaenal Abidin Ahmad.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang permasalahan, maka fokus kajian penelitian dan batasan masalah yang diteliti adalah:

1. Konsep pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Zaenal Abidin Ahmad tentang relasi agama dan negara, dimana banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik mereka hidup, dan juga kapasitas dan latar belakang keilmuan yang mereka kuasai.
2. Persamaan dan perbedaan pemikiran Taqiyyudin al-Nabhani dan Zaenal Abidin Ahmad tentang relasi agama dan negara.

Melalui eksplanasi yang mencoba menghubungkan keduanya akan diperoleh seperangkat teori dan pernyataan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka dengan cara ini tujuan penelitian dapat dicapai secara komprehensif.

C. Rumusan Masalah

Beberapa pertanyaan yang diajukan untuk dijawab melalui penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemikiran Taqiyyudin al-Nabhānī dan Zaenal Abidin Ahmad tentang hubungan agama dan negara?
2. Apa persamaan dan perbedan pemikiran Taqiyyudin al-Nabhānī dan Zaenal Abidin Ahmad tentang relasi agama dan negara?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendiskripsikan atau mengungkapkan pemikiran Taqiyyudīn al-Nabhānī dan Zaenal Abidin Ahmad tentang relasi agama dan negara.
2. Menganalisis dan menjelaskan apa persamaan dan perbedaan pemikiran Taqiyyudīn al-Nabhānī dan Zaenal Abidin Ahmad mengenai relasi agama dan negara.

E. Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bermanfaat dan penting baik secara teoritis (ilmiah) maupun praktis (amaliah). Diantara manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami pemikiran Taqiyyudīn an-Nabhānī dan Zaenal Abidin Ahmad tentang konsep Negara Islam yang tertuang dalam buku-buku yang mereka tulis. Tidak hanya berhenti pada konsep Negara Islam menurut kedua tokoh tersebut, tetapi lebih jauh untuk menganalisa dan mengetahui seberapa jauh pengaruh pemikiran kedua tokoh tersebut dalam dunia Islam, baik pengaruh tersebut bersifat lokal, nasional dan bahkan internasional. Dengan memahami pemikiran kedua tokoh ini tentang konsep negara Islam, diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan dalam membaca dinamika pemikiran tokoh tentang Negara Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat secara praktis

Diskursus tentang Negara Islam yang dikemukakan oleh banyak pemikir Islam saat ini menarik untuk dikaji dan dibahas secara intens. Karena meskipun sama-sama memakai istilah yang sama tapi ada perbedaan yang sangat signifikan dalam pengertian dan aktualisasinya. Al-Nabhānī lebih menekankan pada formalisasi Islam dalam negara, dalam artian negara Islam yang dimaksud adalah negara Madinah yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dan *khulafā' rashidūn*. Sedangkan Zaenal Abidin Ahmad lebih menekankan pada penerapan Islam 12ubstantive dalam negara Islam, dalam artian tidak harus sam persis dengan sistem pemerintahan pada zaman Nabi dan *khulafā' rashidūn*, tapi yang lebih penting adalah prinsip-prinsip nilai harus ada dalam suatu negara, maka sudah bisa dikatakan dengan Negara Islam.

Dengan memahami dan mengerti pemikiran kedua tokoh tersebut, kemudian dilanjutkan dengan mengkomparasikannya, diharapkan mampu untuk mengambil nilai-nilai dari pemikiran kedua pemikiran tokoh tersebut, dengan tanpa mengesampingkan sisi konekstual saat ini, dan pada akhirnya bisa diterapkan pada pemerintahan Negara Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Sampai sejauh ini, ada beberapa tulisan atau dokumentasi lainnya tentang pemikiran konsep Negara Islam menurut para tokoh, diantaranya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disertasi Syafiuddin pada program Pascasarjana IAIN Syarif Hadayatullah Jakarta (UIN Jakarta) pada tahun 2000 yang kemudian dibukukan dengan judul "Negara Islam menurut Konsep Ibnu Khaldun". Dalam penelitiannya tersebut, Syaifudin mengungkapkan bentuk negara yang berdasarkan agama (*siyasah diniyah*) menurut Ibnu Khaldun beserta aspek-aspek ajaran Islam yang berperan pada sistem kenegaraan yang dimaksud dan prinsip, sistem beserta mekanisme pemerintahan dalam Islam menurut Ibnu Khaldun.

Disertasi M. Hasbi Amiruddin pada program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 1996 yang kemudian dibukukan dengan judul "Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman". Dalam penelitiannya tersebut, M. Hasbi Amiruddin membahas pemikiran Fazlur Rahman yang berkaitan dengan bentuk negara dan pemerintahan, tujuan negara, kedudukan kepala negara dan wewenangnya, serta soal kedaulatan.

Tesis Ari Arkanudin pada program Pascasarjana UIN Sunan Kaliajaga, Yogyakarta pada tahun 2014 yang berujudul "Studi Komparasi Konsep Kepemimpinan Antara *Imamah* (Shiah Imamiyyah) dan *Khilafah* (Hizb Tahrir)." Dalam penelitiannya, Ari Arkanudin memaparkan tentang pandangan Shi'ah Imamiyyah dan Hizb Tahrir mengenai Negara, konsep kepemimpinan Shi'ah Imamiyyah dengan imamnya dan Hizb Tahrir dengan khalifahnya, beserta perbandingan konsep kepemimpinan Shi'ah Imamiyyah dengan imam dan Hizb Tahrir dengan khalifahnya ditinjau dari beberapa aspek.

Tesis Samud pada program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati, Cirebon pada tahun 2011 yang berjudul "Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Tentang Hubungan Islam dengan Negara." Pada penelitiannya, Samud memaparkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara terpisah antara konsep Islam pada satu sisi dan Negara di sisi yang lain menurut KH. Abdurrahman Wahid. Setelah memaparkan dan menjelaskan antara Islam dan Negara menurut KH. Abdurrahman Wahid, Samud mendeskripsikan implementasi dan implikasi dari pemikiran KH. Abdurrahman Wahid.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, dalam penelitian ini, penulis lebih cenderung untuk meneliti bagaimana sebuah pemikiran tokoh tentang Negara Islam terkonstruk berdasarkan elemen-elemen yang mempengaruhi pikirannya. Dalam hal ini, Taqiyyudin al-Nabhānī dan Zaenal Abidin Ahmad adalah kedua tokoh yang mempunyai konsep tentang bangun Negara Islam yang hidup sezaman tapi berbeda tempat. Sehingga tidak bisa dipungkiri ada persamaan di satu sisi dan perbedaan pada sisi yang lain.

G. Kerangka Teoritik

Di dalam memahami konsep pemikiran tokoh yang sangat luas, penulis menggunakan teori yang dipakai sebagai pembatas dan panduan dalam hal melakukan penelitian terhadap tokoh yang akan diteliti. Penulis memandang bahwa dalam penelitian tentang konstruk pemikiran relasi agama dan negara dalam pandangan Taqiyyudin al-Nabhani dan Zaenal Abidin Ahmad, teori yang relevan adalah teori tiga dimensi John Obert Voll.

Dalam mengkaji pemikiran seorang tokoh, Voll menggunakan teori tiga dimensi yang terdiri dari; *pendekatan individual*, pendekatan ini berusaha menjelaskan tentang kondisi tokoh yang diteliti dilihat dari sudut latar belakang akademis atau pendidikan tokoh. *Kedua, pendekatan kondisi lingkungan* (local condition). Lingkungan dimana tokoh hidupsangat berperan besar dalam memberikan konstribusi terhadap pemikiran tokoh, hal ini karena kondisi-kondisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu yang dialami oleh tokoh bisa jadi tidak ditemukan di daerah lain. Sehingga kondisi seperti ini sedikit banyak berpengaruh pada konstruksi pemikiran tokoh. Dan yang *terakhir* adalah *kondisi global,* artinya bahwa keadaan global atau dunia yang lebih luas dari pada kondisi lingkungan dimana tokoh hidup sangat berpengaruh dalam konstruksi pemikirannya.[15]

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian karya ini adalah pendekatan historis-kritis, sosio-kultural dan fenomenologi. Pendekatan historis-kritis dan sosio-kultural dimaksudkan untuk mendeskripsikan masa lalu dan sejauh mana dimensi sosial budaya pada masanya turut mempengaruhi perkembangan pemikiran Taqiyyudin an-Nabhani dan Zaenal Abidin Ahmad. Sedangkan pendekatan fenomenologi diharapkan dapat mengungkapkan pemikiran dan kecenderungan arah pemikiran Taqiyyudin an-Nabhani dan Zaenal Abidin Ahmad.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis dan komparatif. Penelitian ini berusaha memaparkan bangunan Islam dan kenegaraan secara umum, kemudian mendeskripsikan kerangka pemikiran tokoh yang diteliti yaitu Taqiyyudin an-Nabhani dan Zaenal Abidin Ahmad melalui data yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis interpretasi tentang substansi pemikiran kedua tokoh tersebut dengan membangun korelasi yang dianggap signifikan. Kemudian

[15] John Obert Voll, Islam Continuity and Change in the Modern Word, (Syracuse: University Press, Second Edition, 1994), 4-5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa muncul karakteristik pemikiran serta persamaan dan perbedaan kedua tokoh ini.

3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, penulis mengumpulkan data-data, baik data primer maupun skunder, dalam hal ini dilakukan dengan membaca, mencatat dan mengutip dari hal-hal yang diteliti dari berbagai sumber yang ada:

a. Sumber / Bahan Primer

Yaitu buku-buku yang ditulis oleh kedua tokoh yang dijadikan obyek penelitian. Pertama adalah buku-buku karanga Taqiyyudin an-Nabhani yang berkaitan dengan Negara Islam, antara lain: *Al-Takattu al-Hizb, Nizm al-Hukm fi al-Islam, Nazarat Siyasiyah li Hizb Tahrir, al-Khilafah, Nuqtat al-Intilaq, Mafahim Siyasiyah li Hizb Tahrir, al-Daulah al-Islamiyyah.* Kedua adalah buku-buku yang ditulis oleh Zaenal Abidin Ahmad, antara lain: *Membentuk Negara Islam* dan *Ilmu Politik Islam.*

b. Sumber / Bahan Sekunder

Yaitu buku-buku yang ditulis oleh para pemikir Islam yang sangat kompeten tentang Negara Islam dan sangat bermanfaat untuk dijadikan pembanding sekaligus pelengkap dari karya-karya rujukan utama. Diantara referensi pelengkap ini adalah karya Abu Hasan al-Mawardi yang berjudul *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah* dan ‘Ali ‘Abd al-Raziq yang berjudul *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm.*

c. Sumber / Bahan Tersier

Sumber / Bahan ini berupa kamus, ensklopedi dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan telaah kepustakaan (*library research*). Telaah kepustakaan dilakukan dengan cara membaca karya-karya Taqiyyudin an-Nabhani dan Zaenal Abidin Ahmad yang membahas tentang konsep Negara Islam. Selain karya-karya yang ditulis oleh kedua tokoh tersebut, karya-karya lain yang ditulis oleh pemikir Islam maupun non-muslim sangat berharga dan menjadi bahan masukan yang sangat penting dalam penelitian ini, ditambah dengan sumber-sumber tambahan yang tidak kalah berharganya.

5. Analisis Data

Analisis penelitian dilakukan dengan menelaah sumber-sumber kepustakaan, sumber primer maupun sumber-sumber lain yang mendukung. Metode analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan suatu hipotesis. Analisa data terdiri atas pengujian, pengkategorian, ataupun pengkombinasian kembali buku-buku untuk menunjukkan preposisi awal suatu penelitian. Data yang telah terkumpul akan dianalisis yang bersifat kualitatif, yaitu menjabarkan dalam bentuk kalimat secara jelas, sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap dalam suatu kesimpulan penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab *pertama,* pendahuluan, merupakan bagian awal dari penelitian yang dapat dijadikan sebagai awalan dalam memahami keseluruhan isi dari pembahasan. Bab ini berisi beberapa sub bagian meliputi; latar belakang permasalahan, fokus kajian dan kegunaan, kajian terdahulu, metodologi, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua,* mengulas tentang gambaran umum tentang relasi agama dan negara. Hal ini diperlukan untuk memberikan gambaran tentang konsep dan sistem relasi agama dan negara saat ini. Bab ini terbagi atas tiga sub, *pertama,* membahas tentang definisi Negara Islam. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apa itu Negara Islam. *Kedua,* Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Islam. *Ketiga,* membahas hubungan Negara dan Agama. Pemaparan ini perlu untuk memahami akibat hukum yang timbul dari terbentuknya Negara Islam dalam konteks dunia modern sekarang ini.

Bab *ketiga,* tentang biografi Taqiyyudin an-Nabhani yang mengulas tentang riwayat hidup dan pengalaman serta aktifitas keilmuan Taqiyyudin an-Nabhani dari segi latar belakang sosial dan pendidikannya, dan dilanjutkan pemaparan pemikirannya mengenai Negara Islam. Kemudian dilanjutkan pemaparan tentang biografi Zaenal Abidin Ahmad yang juga mengulas tentang riwayat hidup dan pengalaman serta aktivitas keilmuan Zaenal Abidin Ahmad ditinjau dari segi latar belakang sosial dan pendidikannya, selanjutnya deskripsi pemikiran Zaenal Abidin Ahmad tentang relasi agama dan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab *keempat,* memuat tipologi / paradigma pemikiran Taqiyyudin an-Nabhani dan Zaenal Abidin Ahmad yang berkenaan dengan sub-sub bahasan tentang relasi agama dan negara yang meliputi; agama dan kekuasaan politik serta agama dan partisipasi politik rakyat.

Bab *kelima,* analisa penulis tentang persamaan dan perbedaan pemikiran Taqiyyudīn al-Nabhani dan Zainal Abidin Ahmad tentang relasi agama dan negara. Dilanjutkan dengan kesimpulan penulis, tentang pemikiran yang lebih relevan dan kompatibel diantara keduanya.

Bab *keenam,* penutup, merupakan bagian yang menguraikan temuan dari penelitian. Bagian ini berisi kesimpulan dan implikasi teoritis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id